

# BUKU SAWIT

Menelusuri kemajuan komitmen  
kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia





# DAFTAR ISI

04	<b>TENTANG LAPORAN INI</b>
05	<b>TEMUAN-TEMUAN PENTING</b>
06	<b>KATA PENGANTAR</b>
07	<b>PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM RANTAI PASOKAN KELAPA SAWIT</b>
10	<b>KELAPA SAWIT: USAHA YANG BERISIKO</b>
12	<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN</b>
13	<b>TARGET VS IMPLEMENTASI</b>
16	<b>PELIBATAN RANTAI PASOKAN</b>
19	<b>KESIMPULAN</b>

## **Pemberitahuan Penting**

Isi laporan ini dapat digunakan oleh siapa pun dengan ketentuan bahwa CDP diberikan pengakuan. Hal ini bukan izin untuk mengemas kembali atau menjual kembali setiap data yang dilaporkan kepada CDP atau para penulis yang berkontribusi dan disajikan dalam laporan ini. Apabila Anda bermaksud untuk mengemas kembali atau menjual kembali setiap isi laporan ini, Anda harus memperoleh izin yang tegas dari CDP sebelum melakukannya.

CDP telah menyusun data dan analisa dalam laporan ini berdasarkan tanggapan terhadap permintaan informasi CDP 2018. Tidak ada pernyataan atau jaminan (yang tersurat atau tersirat) yang diberikan oleh CDP terkait dengan akurasi atau kelengkapan dari informasi dan pendapat yang tercantum dalam laporan ini. Anda hendaknya tidak bertindak berdasarkan informasi yang terdapat dalam publikasi ini tanpa memperoleh nasihat profesional khusus. Sepanjang yang diizinkan berdasarkan undang-undang, CDP tidak menerima atau menanggung pertanggungjawaban, tanggung jawab atau kewajiban kehati-hatian apa pun atas setiap konsekuensi dari Anda atau siapa pun yang bertindak, atau tidak bertindak, dengan mengandalkan informasi yang termuat dalam laporan ini atau atas setiap keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Semua informasi dan pandangan yang diungkapkan dalam laporan ini oleh CDP didasarkan pada penilaiannya pada waktu laporan ini dan dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan karena faktor ekonomi, politik, industri dan faktor spesifik firma. Komentar tamu yang dicantumkan dalam laporan ini mencerminkan pandangan penulisnya masing-masing; pencantumannya bukan dukungan atas pandangan tersebut.

CDP, firma atau perusahaan anggota afiliasinya, atau masing-masing pemegang saham, anggota, mitra, prinsipal, direktur, pejabat dan/atau karyawannya, mungkin memiliki posisi dalam efek perusahaan yang dibahas dalam laporan ini. Efek perusahaan yang disebutkan dalam dokumen ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk dijual di beberapa negara bagian atau negara, atau tidak sesuai untuk semua jenis investor; nilainya dan pendapatan yang dihasilkannya dapat berfluktuasi dan/atau berdampak secara merugikan oleh kurs.

'CDP' mengacu pada CDP North America, Inc, sebuah organisasi nirlaba dengan status amal 501(c)3 di AS dan CDP Worldwide, sebuah lembaga amal yang terdaftar nomor 1122330 dan sebuah perusahaan yang dibatasi dengan jaminan, yang terdaftar di Inggris nomor 05013650.

# TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini merupakan laporan kedua dalam serangkaian laporan untuk mengkaji aksi yang diambil oleh perusahaan yang memproduksi, memperoleh atau menggunakan produk yang dibuat dengan minyak sawit yang diproduksi di Indonesia. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang kemajuan dan kinerja perusahaan tersebut. Analisa didasarkan pada data yang dilaporkan sendiri dari hampir 100 perusahaan yang beroperasi dalam industri

Pada tahun 2019, lebih dari 500 perusahaan terbesar di dunia dan para pemasoknya mengungkapkan melalui kuesioner kehutanan CDP kepada para pemegang saham dan/atau pembeli mereka tentang risiko inheren dan strategi untuk mengelola produksi dan pemerolehan komoditas pertanian yang paling berkaitan dengan deforestasi.

Jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan untuk komoditas tersebut telah meningkat secara stabil: dari 211 perusahaan pada tahun 2017, menjadi 455 perusahaan pada tahun 2018, hingga 543 perusahaan di tahun ini. Dari 543 perusahaan yang melakukan pengungkapan

tahun ini, 96 melaporkan memproduksi atau memperoleh minyak sawit atau produk yang mengandung minyak sawit dari Indonesia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 20% dari tahun 2018 dan pertumbuhan yang luar biasa sebesar 50% dari tahun 2017.

Dengan memerhatikan semakin banyaknya perusahaan yang melaporkan risiko dan dampak deforestasi mereka kepada CDP dan diperlukannya kerja sama di seluruh rantai pasokan untuk mengakhiri deforestasi, laporan ini bertujuan untuk mengamati kemajuan dan kinerja perusahaan yang melakukan pelaporan baik kepada para investor maupun perusahaan pembeli.



# TEMUAN-TEMUAN PENTING

- 1 Terdapat kesenjangan yang lebar antara ambisi dan kenyataan**
  - ▼ Ratusan perusahaan telah membuat komitmen untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan mereka dan banyak dari perusahaan tersebut yang memiliki sasaran batas waktu pada tahun 2020. Secara keseluruhan, perusahaan pengguna minyak sawit tidak akan mencapai sasaran tersebut.
  - ▼ Baik sasarannya adalah memperoleh minyak sawit bersertifikasi atau menetapkan ketertelusuran, hanya kurang dari 20% perusahaan yang mengatakan bahwa mereka akan mencapai target mereka pada tahun 2020.
- 2 Risikonya lebih besar dari yang disadari oleh perusahaan**
  - ▼ 33 perusahaan melaporkan bahwa secara agregat mereka mungkin dapat mengalami kerugian sebesar US\$4,9 miliar apabila risiko tidak dikelola. Meskipun demikian, hal ini kemungkinan tidak mencakup dampak secara keseluruhan - karena dua pertiga perusahaan tidak melaporkan dampak keuangan dari risiko mereka, dan perusahaan sangat meremehkan risiko peraturan dan reputasi mereka.
  - ▼ Meskipun dengan adanya bahaya yang mengintai tersebut, lebih dari sepuluh persen perusahaan masih tidak mempertimbangkan deforestasi dalam penilaian risiko mereka.
- 3 Struktur tata kelola perusahaan mulai mencerminkan besarnya masalah tersebut**
  - ▼ Perusahaan-perusahaan mulai memerhatikan besarnya krisis deforestasi. 91%, yang merupakan angka yang luar biasa besar, dari perusahaan pelapor memiliki pengawasan tingkat direksi terhadap masalah terkait hutan - meningkat dari hanya sebesar 69% dua tahun yang lalu. Perusahaan juga mulai menggunakan inisiatif seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka kerja untuk mengelola deforestasi.
  - ▼ Meskipun demikian, hanya sepertiga perusahaan yang telah memiliki kebijakan yang berkomitmen untuk menghilangkan deforestasi dan konversi.
- 4 Dibutuhkan segera adanya peningkatan transparansi**
  - ▼ Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang melaporkan penggunaan mereka atas minyak sawit dari Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 20%. Akan tetapi, pengungkapan tersebut masih didominasi oleh para pabrikan dan peritel yang berada di Amerika Utara dan Eropa. Perusahaan di sektor hulu adalah perusahaan yang paling dekat dengan hutan dan merupakan para pengambil keputusan terkait dengan apakah deforestasi akan terjadi. Pengungkapan di antara perusahaan di sektor hulu sangat penting, karena tanpa data mereka, para investor dan perusahaan pembeli tidak dapat melakukan penilaian yang memadai atas paparan mereka terhadap risiko atau mengidentifikasi peluang.

# FOREWORD



**Morgan Gillespy**  
Director, Forests

**Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menahan dampak perubahan iklim dan membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius. Menghindari deforestasi dan implementasi reboisasi tropis merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya untuk menanggulangi perubahan iklim - yang memberikan hingga sepertiga mitigasi yang diperlukan sampai dengan tahun 2030 untuk menahan kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celsius secara efisien<sup>1</sup>.**

Komitmen untuk menahan laju deforestasi telah dinyatakan bukan hanya oleh pemerintah, yang didorong oleh Perjanjian Paris, namun juga oleh sektor swasta dan masyarakat sipil. Pada tahun 2010, anggota dalam *Consumer Goods Forum* – yang termasuk 400 perusahaan peritel, pabrik, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan lainnya dari tujuh negara – berkomitmen untuk memobilisasi sumber daya dalam usaha mereka masing-masing untuk mencapai komitmen tanpa deforestasi bersih (*zero net deforestation*) pada tahun 2020. Empat tahun kemudian, lebih dari 200 organisasi, termasuk pemerintah, korporasi, masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat adat mendukung *New York Declaration on Forests*, dengan berkomitmen untuk berupaya mengurangi separuh deforestasi tropis pada tahun 2020 dan mengakhirinya pada tahun 2030.

Akan tetapi, pada saat dilakukannya analisa ini, kurang dari 100 hari menuju tahun 2020, pertanian komersial masih menjadi faktor pendorong utama deforestasi. Antara tahun 2001 dan 2015, bidang hutan berukuran hampir sebesar 18 lapangan sepak bola digunduli tiap menit di seluruh dunia untuk membuat ruang bagi pertanian komersial<sup>2</sup>. Di Indonesia, lebih dari 9,1 juta hektar tutupan hutan primer hilang pada tahun 2001-2018<sup>3</sup>, sebagian besar diakibatkan oleh ekspansi komoditas lunak.

Berbagai aksi telah dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah untuk mengurangi deforestasi. Meskipun demikian, penilaian yang dilakukan belum lama ini mendapati bahwa kurangnya transparansi merupakan tantangan utama dalam

menilai kontribusi komitmen dari sektor swasta; sulit untuk mengukur keefektifan komitmen tersebut karena hanya sebagian kecil perusahaan terkait yang melaporkan aksi mereka secara transparan dan berarti<sup>4</sup>. Selain itu, pengungkapan lingkungan hidup belum digunakan secara luas di antara para produsen komoditas di mana hutan tersebut berada, seperti Indonesia. Peningkatan pengungkapan dari bagian rantai pasokan minyak sawit tersebut sangat penting untuk menilai kemajuan menuju sasaran untuk menahan laju deforestasi.

96 perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui CDP tahun ini terkait produksi dan penggunaan minyak sawit menyebutkan tentang berbagai risiko reputasi, operasi dan peraturan yang signifikan. Untuk mengamankan usaha mereka, perusahaan harus mengatasi deforestasi dalam kegiatan operasi mereka sendiri serta dalam rantai pasokan mereka. Kuesioner hutan CDP mendukung perusahaan dalam upaya untuk menghilangkan deforestasi dari rantai nilai perusahaan dengan memberikan kerangka aksi untuk mengatasi risiko deforestasi dan mewujudkan peluang usaha yang dihasilkan dari praktik yang lebih berkelanjutan.

**Morgan Gillespy**  
Direktur, Program Hutan

1. <https://blog.nature.org/science/science-brief/how-much-does-it-cost-to-save-tropical-forests-and-prevent-climate-change/>  
2. <https://forestdeclaration.org/summary>  
3. <https://rainforests.mongabay.com/deforestation/archive/Indonesia.htm>  
4. [https://forestdeclaration.org/images/uploads/resource/2019NYDF\\_ES.pdf](https://forestdeclaration.org/images/uploads/resource/2019NYDF_ES.pdf)

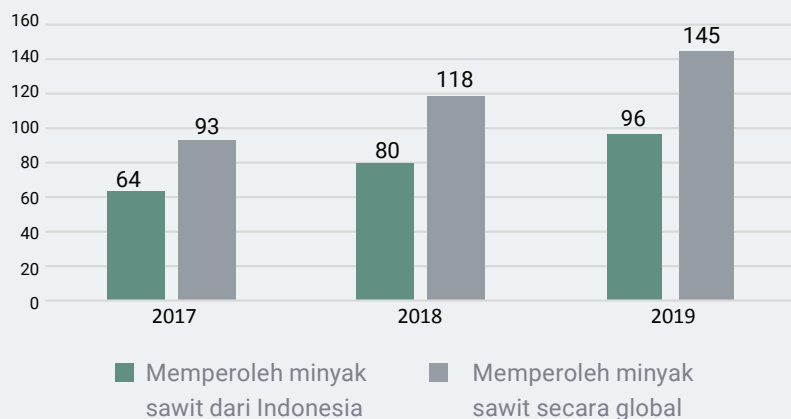
# PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM RANTAI PASOK MINYAK SAWIT

Dari 543 perusahaan yang mengungkapkan penggunaan komoditas terkait hutan di tahun ini, 96 melaporkan memproduksi, memperoleh atau menggunakan produk yang mengandung minyak sawit Indonesia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 20% dari tahun 2018 dan peningkatan sebesar 50% dari tahun 2017.

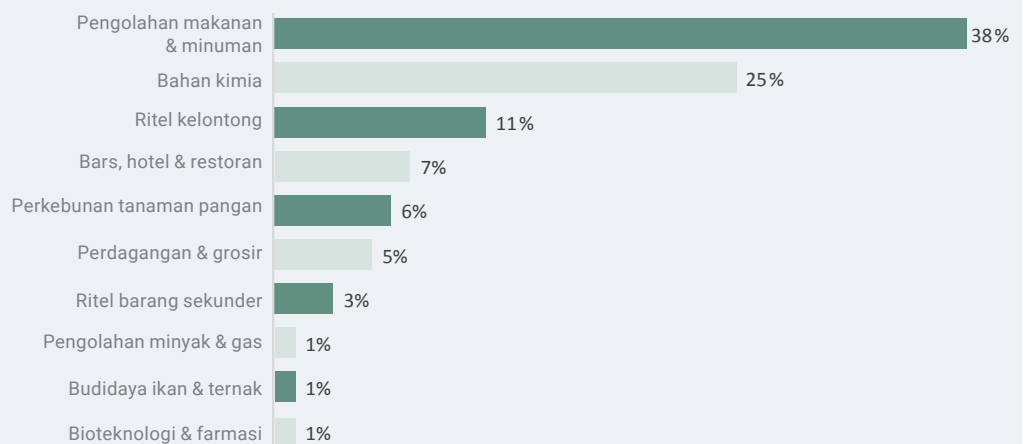
Sebagian besar perusahaan yang melaporkan penggunaan minyak sawit Indonesia kebanyakan termasuk dalam kategori makanan dan pertanian yang termasuk di dalamnya perusahaan pengolahan makanan dan minuman, penjualan ritel, pariwisata dan perkebunan tanaman pangan. Sektor bahan kimia, yang juga direpresentasikan dengan baik,

merupakan sektor sekunder. Perusahaan yang melakukan pengungkapan sebagian besar adalah pabrikan dan peritel, dengan transparansi yang lebih terbatas dari para produsen, pengolah dan penjual di sektor sawit.

**Gambar 1.**  
Perusahaan yang mengungkapkan penggunaan minyak sawit di Indonesia dan secara global



**Gambar 2.**  
Tingkat tanggapan menurut sektor pada tahun 2019



## Kampanye *Non-Disclosure* CDP

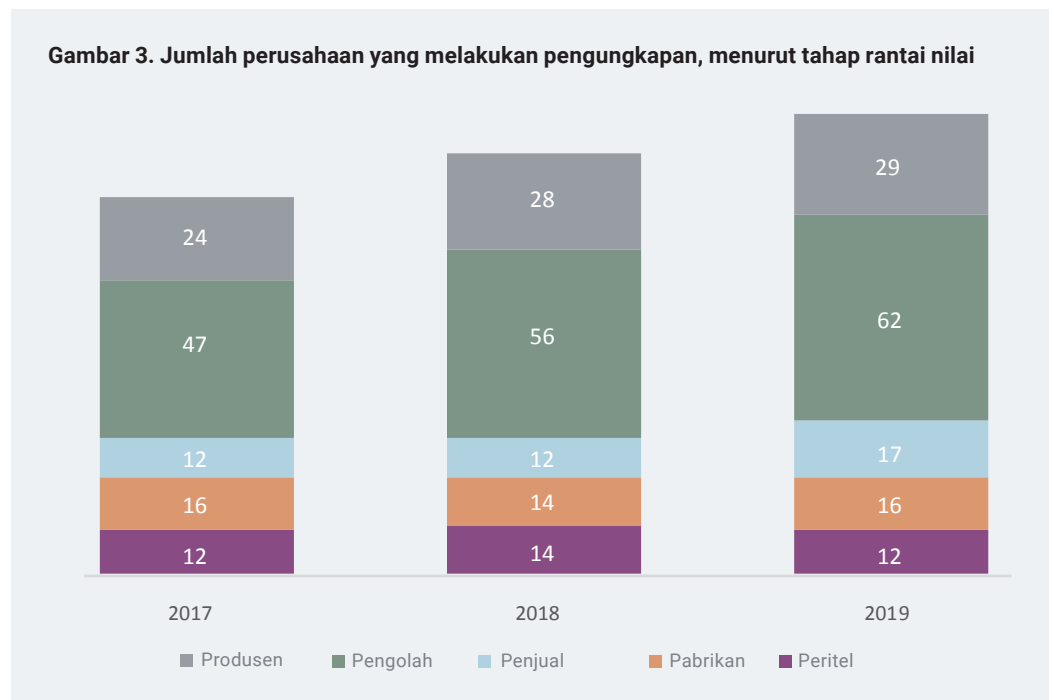
CDP menawarkan kesempatan setiap tahun bagi para investor untuk secara aktif melibatkan perusahaan yang telah menerima permintaan pengungkapan CDP namun belum memberikan tanggapan. Tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk mendorong transparansi perusahaan seputar perubahan iklim, deforestasi dan ketahanan air, dengan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan melalui platform CDP. Tahun ini, para investor termasuk **HSBC Global Asset Management**, **Aviva** dan **Hermes EOS** berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Melalui Kampanye *Non-Disclosure*, para investor menasar perusahaan yang masih belum melakukan pengungkapan seperti **PT Astra Agro Lestari**, **FGV Holdings Berhad**, dan **Kuala Lumpur Kepong**.

### Perusahaan yang masih belum melakukan pengungkapan (2017-2019)

Perusahaan yang masih belum memberikan tanggapan (belum melakukan pengungkapan dalam 3 tahun terakhir)	Kapitalisasi Pasar pada Bulan Oktober 2019 (juta AS\$)	Negara Kantor Pusat
PT Astra International, Tbk	19,609	Indonesia
Charoen Pokphand Indonesia	6,116	Indonesia
FGV Holdings Berhad	816	Malaysia
First Resources Ltd	1,825	Singapura
Kuala Lumpur Kepong Berhad	6,007	Malaysia
PT Astra Agro Lestari Tbk	1,552	Indonesia
Rimbunan Hijau Group	51	Indonesia



**Gambar 3. Jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan, menurut tahap rantai nilai**



Tidak banyak informasi terkait dengan pemahaman di antara para produsen dan pengolah minyak sawit yang berbasis di Indonesia tentang dampak yang mungkin terjadi, karena sebagian besar perusahaan yang melakukan pengungkapan berkantor pusat di Amerika Serikat (30%), diikuti oleh Jepang (14%) dan Inggris Raya (10%). Permintaan untuk peningkatan transparansi masih belum menjangkau rantai pasokan hingga ke para produsen dan pengolah, meskipun perusahaan tersebut memiliki wawasan yang sangat penting tentang risiko yang dihadapi di lapangan.

Data yang dilaporkan kepada CDP pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa dari 96 perusahaan yang memproduksi dan/atau memperoleh minyak sawit dari Indonesia, hanya 8 perusahaan yang memiliki kendali langsung atas lahan. Kedelapan perusahaan tersebut melaporkan luas lahan keseluruhan sebesar 2.552.953 hektare - hanya seperlima dari luas perkebunan kelapa sawit

Indonesia sebesar 12,3 juta hektare<sup>5</sup>. Hal ini berarti bahwa 80% lahan dalam produksi minyak sawit di Indonesia belum dilaporkan secara sebanding dan konsisten. Baik para investor maupun perusahaan hilir hanya memiliki sedikit sekali informasi tentang kegiatan dan langkah yang diambil untuk mengelola deforestasi di lapangan.

Proses pengungkapan CDP memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengukur, mengelola dan mengurangi dampak mereka terhadap masalah lingkungan hidup yang sangat penting seperti deforestasi. Dengan menelusuri indikator kinerja utama termasuk pengawasan tingkat direksi, penilaian risiko dan tata kelola perusahaan - serta langkah implementasi seperti penggunaan sertifikasi, ketertelusuran dan pelibatan pemasok - perusahaan memberikan data yang berarti kepada para pemegang saham investor dan organisasi pembeli, dan menyoroti tentang langkah mereka mencapai kemajuan dalam upaya untuk menghentikan deforestasi.

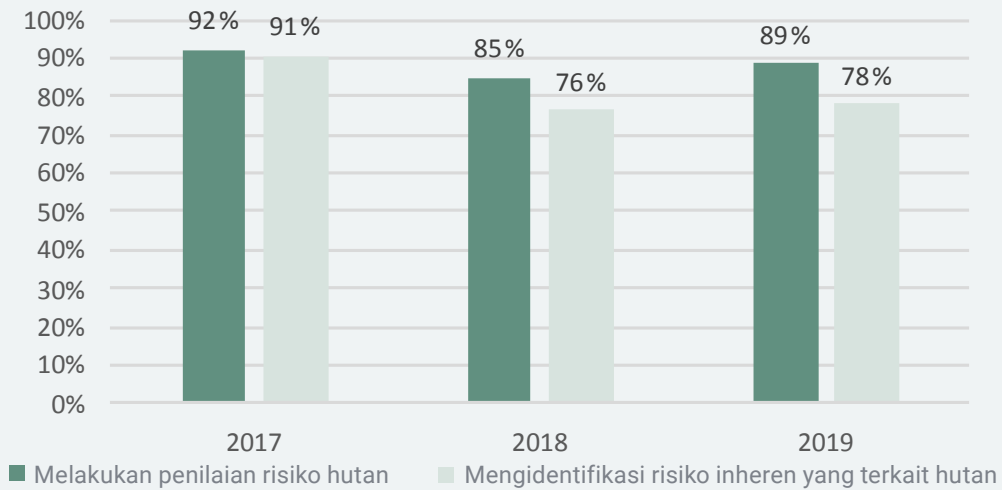
5. BPS, 2018: Indonesian Palm Oil Statistics, 2017

<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=YjczZmY5YTvkYzlmOGQ2OTRkNzQ2MzVm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmtpY2F0aW9uLzlwMTgvMTEvMTMvYjczZmY5YTvkYzlmOGQ2OTRkNzQ2MzVmL3N0YXRpc3Rpay1rZWxhcGEtc2F3aXQtaW5kb25lc2l2hLTlwMTcuahRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAxOS0xMCOyNSAyMDowMzozNQ%3D%3D>

# MINYAK SAWIT: USAHA YANG BERISIKO

Perusahaan semakin menyadari tentang risiko yang terkait dengan produksi atau pengadaan komoditas hutan yang berisiko. Untuk mengelola risiko tersebut, beberapa perusahaan telah mengambil langkah untuk meningkatkan cara untuk mengidentifikasi dan menilai risiko tersebut. Pada tahun 2019, 89% perusahaan pelapor melakukan penilaian risiko terkait hutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengurangi dampak dari risiko ini. 75 perusahaan mengidentifikasi risiko inheren terkait hutan yang dapat berdampak terhadap usaha mereka, jumlah ini meningkat hingga sebanyak 23% dari hanya 61 perusahaan tahun lalu.

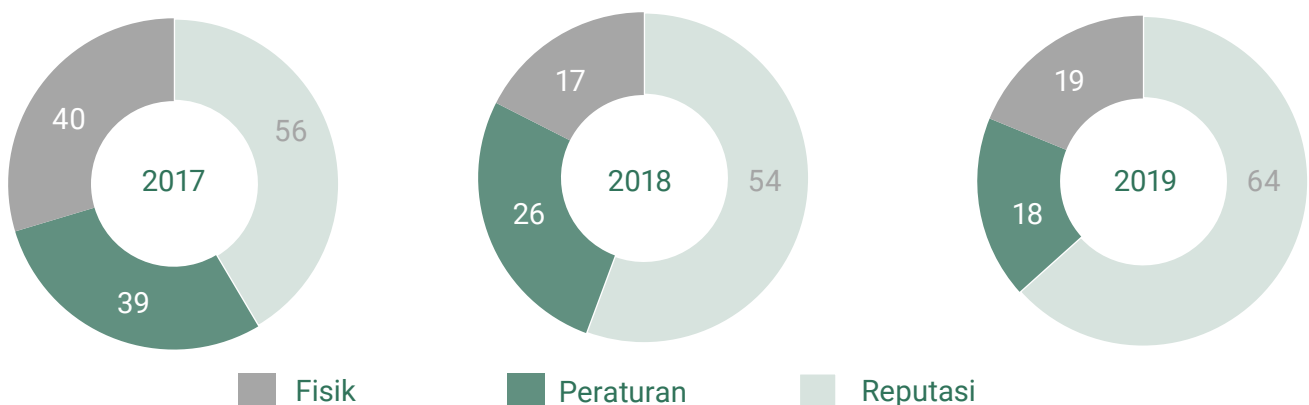
Gambar 4. Identifikasi dan penilaian risiko



Risiko reputasi masih menjadi risiko yang paling sering dilaporkan oleh perusahaan yang memperoleh minyak sawit dari Indonesia, mengalahkan risiko lainnya. Jumlah perusahaan yang melaporkan risiko tersebut meningkat sebesar 14% sejak tahun 2017, dari 56 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 64 perusahaan pada tahun 2018. Lebih dari sepertiga perusahaan

(34%) melaporkan rusaknya merek yang dapat disebabkan oleh konsumsi mereka atas minyak sawit. Sebagai contoh, **Mars** melaporkan potensi dampak keuangan sampai dengan sebesar AS\$1 miliar karena risiko reputasi yang disebabkan oleh kelangkaan minyak sawit bersertifikasi yang mungkin terjadi.

Gambar 5. Perusahaan semakin banyak menyebutkan tentang risiko reputasi



# 33 perusahaan

melaporkan potensi dampak keuangan dari risiko yang terkait dengan produksi atau pengadaan sebesar

# AS\$ 4,9 miliar

Meningkatnya tekanan dari komunitas global terhadap negara produsen untuk mengurangi angka deforestasi dapat menimbulkan risiko usaha bagi sektor kelapa sawit. Sebagai contoh, selain keputusan untuk melarang bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit pada tahun 2030, Uni Eropa mengenakan bea sebesar 8% sampai dengan 18% atas impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia pada bulan Agustus 2019<sup>6</sup>. Dengan kemungkinan diperpanjangnya peraturan tersebut hingga selama lima tahun, implementasi dari kebijakan ini kemungkinan akan memiliki dampak keuangan terhadap perusahaan kelapa sawit. Secara mengejutkan, meskipun dengan adanya perkembangan tersebut, kurang dari seperlima perusahaan (19%) mengidentifikasi peraturan sebagai risiko usaha yang inheren.

Selain risiko reputasi dan peraturan, risiko fisik juga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap usaha dan dapat berdampak seperti berkurangnya imbal hasil dan produktivitas<sup>7</sup>. Dampak risiko fisik dapat menjadi sangat besar. Pada tahun 2019, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra melahap area seluas 8.578 kilometer persegi - setara dengan luas wilayah Puerto Rico.

Kebakaran ini diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun ini<sup>8</sup> yang mengakibatkan hilangnya laba atau setidaknya berkurangnya margin dari perusahaan. Meskipun demikian, hanya seperlima perusahaan yang melaporkan risiko fisik sebagai risiko usaha yang inheren.

Menyadari bahwa risiko deforestasi dapat berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan, CDP meminta perusahaan untuk melaporkan potensi dampak keuangan yang terkait dengan risiko deforestasi yang substantif. Pada tahun 2019, walaupun hanya sepertiga dari semua perusahaan (33) yang memberikan informasi tersebut, nilai yang dilaporkan dari estimasi risiko mencapai total sebesar US\$4,9 miliar. Meskipun dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melaporkan potensi dampak keuangan dan jumlah estimasi risiko yang signifikan, rendahnya proporsi perusahaan yang melaporkan data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan tentang dampak yang mungkin terjadi dari risiko deforestasi masih sangat rendah dan dampak keseluruhannya kemungkinan jauh lebih besar.



## Studi Kasus: Neste Oyj

Risiko peraturan dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan produk dan layanan

### Dampak keuangan: AS\$110 juta

Tanggapan: Neste menggunakan beberapa metode untuk mengelola risiko yang terkait dengan perubahan peraturan: 1) Meningkatkan fasilitas produksi untuk menggunakan bahan baku dengan kualitas yang lebih rendah, dan secara bersamaan mengarahkan fungsi rantai pasok untuk mencari bahan tersebut; 2) Memantau peraturan secara berkala; 3) Berbagi data dan secara aktif mendorong kesadaran tentang permasalahan terkait kelapa sawit kepada regulator dan pemangku kepentingan lainnya; 4) Menggunakan kajian bersama dengan lembaga nasional dan internasional, serta LSM dan IGO; 5) Menyempurnakan rantai pasokan kelapa sawit untuk mengurangi risiko reputasi, yang sering kali mengakibatkan perubahan peraturan; 6) Mengembangkan produk terbarukan dengan menggunakan anggaran litbang.

Biaya tanggapan: US\$57,2 juta



## Studi Kasus: Kao Corporation

Meningkatnya kekhawatiran pemangku kepentingan atau respon negatif dari pemangku kepentingan menimbulkan risiko terhadap merek.

### Dampak keuangan: US\$282 juta

Tanggapan: Kao berkeinginan pada tahun 2020 untuk hanya memperoleh bahan baku yang tidak terkait dengan deforestasi di tempat asalnya, berdasarkan Pedoman Pengadaan Minyak Sawit Berkelanjutan. Tujuan tersebut dijadikan tujuan bersama dengan semua pemasok mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kao menyelidiki risiko deforestasi di tempat asal melalui prosedur berikut ini: 1) Mendapatkan informasi tentang pabrik inti kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit dari para pemasok langsung, dan memetakan informasi ini; 2) Mengidentifikasi rantai pasok pabrik inti kelapa sawit; 3) Melakukan pemetaan risiko dari semua pabrik kelapa sawit, dan mengidentifikasi pabrik yang kemungkinan melakukan usaha dengan perkebunan yang memiliki risiko deforestasi yang lebih tinggi; 4) Mengunjungi dan melakukan investigasi terhadap pabrik yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut, ketertelusuran hingga ke pabrik minyak sawit mencapai 98% pada tahun 2018.

Biaya tanggapan: US\$94.000



6. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/eu-sets-duties-of-up-to-18-on-indonesian-biodiesel>  
7. [http://sustainability.mpob.gov.my/wp-content/uploads/2018/01/Nadia-and-Fatimah-2017\\_OilPalmBulletin.pdf](http://sustainability.mpob.gov.my/wp-content/uploads/2018/01/Nadia-and-Fatimah-2017_OilPalmBulletin.pdf)  
8. <https://news.mongabay.com/2019/10/indonesia-fire-burning-forest-haze-hotspots-peatland-deforestation/>

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Seiring meningkatnya pemahaman perusahaan terhadap risiko yang terkait dengan deforestasi, perusahaan mulai membangun struktur tata kelola untuk mengelola risiko tersebut. Jumlah perusahaan yang melaporkan memiliki pengawasan direksi terhadap masalah deforestasi telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2017. Dari 96 perusahaan yang melaporkan menggunakan kelapa sawit dari Indonesia pada tahun 2019, 91% melaporkan memiliki pengawasan tingkat direksi terhadap masalah terkait hutan - meningkat dari hanya sebesar 69% pada tahun 2017. Mengangkat isu hutan kepada direksi merupakan cara yang penting untuk mengarusutamakannya, yang menunjukkan semakin pentingnya isu deforestasi di dalam ruang direksi perusahaan dan meningkatnya kemampuan dari para eksekutif untuk mendorong aksi untuk melindungi hutan.

Demikian pula, jumlah perusahaan yang melaporkan kebijakan yang mencakup masalah terkait hutan meningkat sebesar 35% menjadi 81% tahun lalu. Perusahaan melaporkan lebih banyak komitmen untuk mengatasi deforestasi dalam kebijakan perusahaan dan berkomitmen untuk melakukan segala hal mulai dari meningkatkan

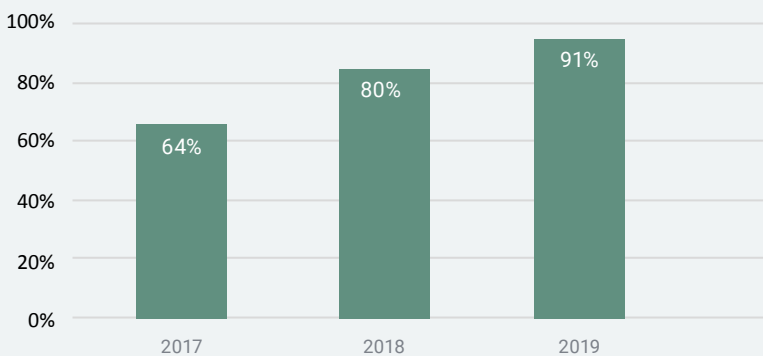
transparansi, hingga menilai hutan dengan sebagaimana mestinya, hingga meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan.

Sebuah perkembangan yang disambut baik pada tahun 2019 adalah jumlah perusahaan yang menyelaraskan kebijakan mereka dengan berbagai inisiatif seperti **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**. Dimasukkannya inisiatif tersebut ke dalam kebijakan perusahaan meningkat sebesar 44% antara tahun 2018 dan 2019. Kerangka pengungkapan hutan CDP dapat mendukung sektor swasta dalam memantau implementasi *SDGs* terkait hutan - khususnya sasaran 6, 7, 12, dan 13 - dan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan keberhasilan mereka, yang membuat kedua kerangka tersebut saling mendukung.

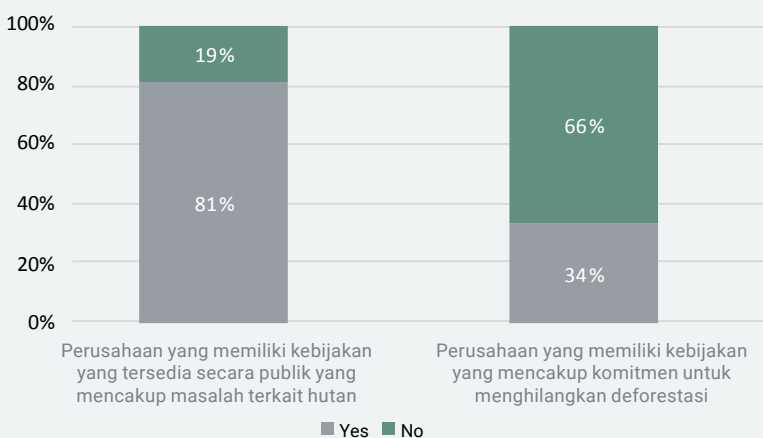
Sementara itu, ratusan perusahaan telah membuat komitmen untuk mengakhiri deforestasi - baik melalui **Consumer Goods Forum, New York Declaration on Forests**, atau **We Mean Business**. Data CDP menunjukkan bahwa 81% perusahaan pelapor telah menandatangani komitmen publik untuk mengurangi atau menghilangkan deforestasi. Akan tetapi dari jumlah tersebut, hanya 34% yang telah menerapkan kebijakan perusahaan yang menegaskan komitmen tersebut. Meskipun sejumlah besar komitmen telah ditetapkan, kebijakan yang akan mendukung implementasi komitmen tersebut masih kurang.

Pada tahun 2019, hampir seperlima perusahaan (19%) yang memperoleh dan/atau memproduksi kelapa sawit dari Indonesia melaporkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen publik untuk mengurangi atau menghilangkan deforestasi. Dari perusahaan yang memiliki komitmen, hanya 24% yang melaporkan komitmen Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) yang terbaik di kelasnya dan terikat waktu<sup>9</sup>.

**Gambar 6. Pengawasan tingkat direksi menjadi norma**



**Gambar 7. Masih kurangnya kebijakan terkait deforestasi**



9. No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy (NDPE) aligned commitments including commitment to eliminate deforestation and/or conversion, no development of peatland and FPIC with a specific timeframe for implementation.

# TARGET VS IMPLEMENTASI

Hanya 19% dari perusahaan yang memiliki target sertifikasi pihak ketiga pada tahun 2020 atau sebelumnya yang melaporkan bahwa mereka telah mencapai lebih dari 90% targetnya.

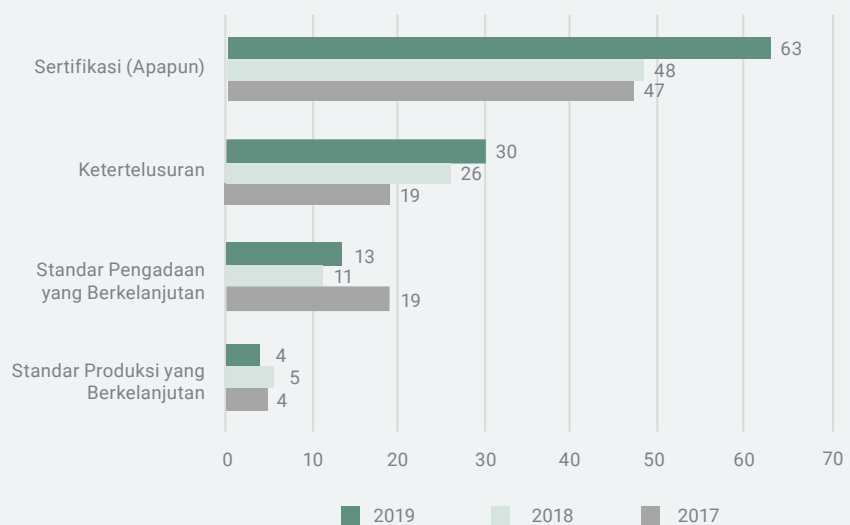
Hanya 20% dari perusahaan yang memiliki target ketertelusuran pada tahun 2020 yang telah mencapai lebih dari 90% target yang mereka nyatakan.

Layaknya komitmen dan kebijakan tanpa deforestasi yang terikat waktu lebih berpotensi untuk mengurangi deforestasi dengan memberikan garis waktu yang jelas untuk peralihan menuju produksi berkelanjutan, target yang jelas juga sangat penting bagi implementasi kebijakan dan komitmen secara tepat waktu. Ketertelusuran dan sertifikasi adalah jenis target terkait hutan yang paling umum diterapkan oleh berbagai perusahaan.

## Skema sertifikasi pihak ketiga

RSPO masih merupakan sertifikasi yang paling banyak dilaporkan oleh perusahaan pada tahun 2019. Sebagian besar perusahaan melaporkan target yang difokuskan pada penggunaan sertifikasi RSPO *Mass Balance* untuk memenuhi komitmen mereka. Sertifikasi RSPO yang lebih ketat, seperti RSPO *Identity Preserved* dan RSPO *Next*, tidak banyak digunakan oleh perusahaan, dengan hanya sebanyak sekitar 17% dan 4% perusahaan pada tahun 2019 yang melaporkan masing-masing jenis target ini.

Gambar 8. Jenis target yang dilaporkan oleh perusahaan



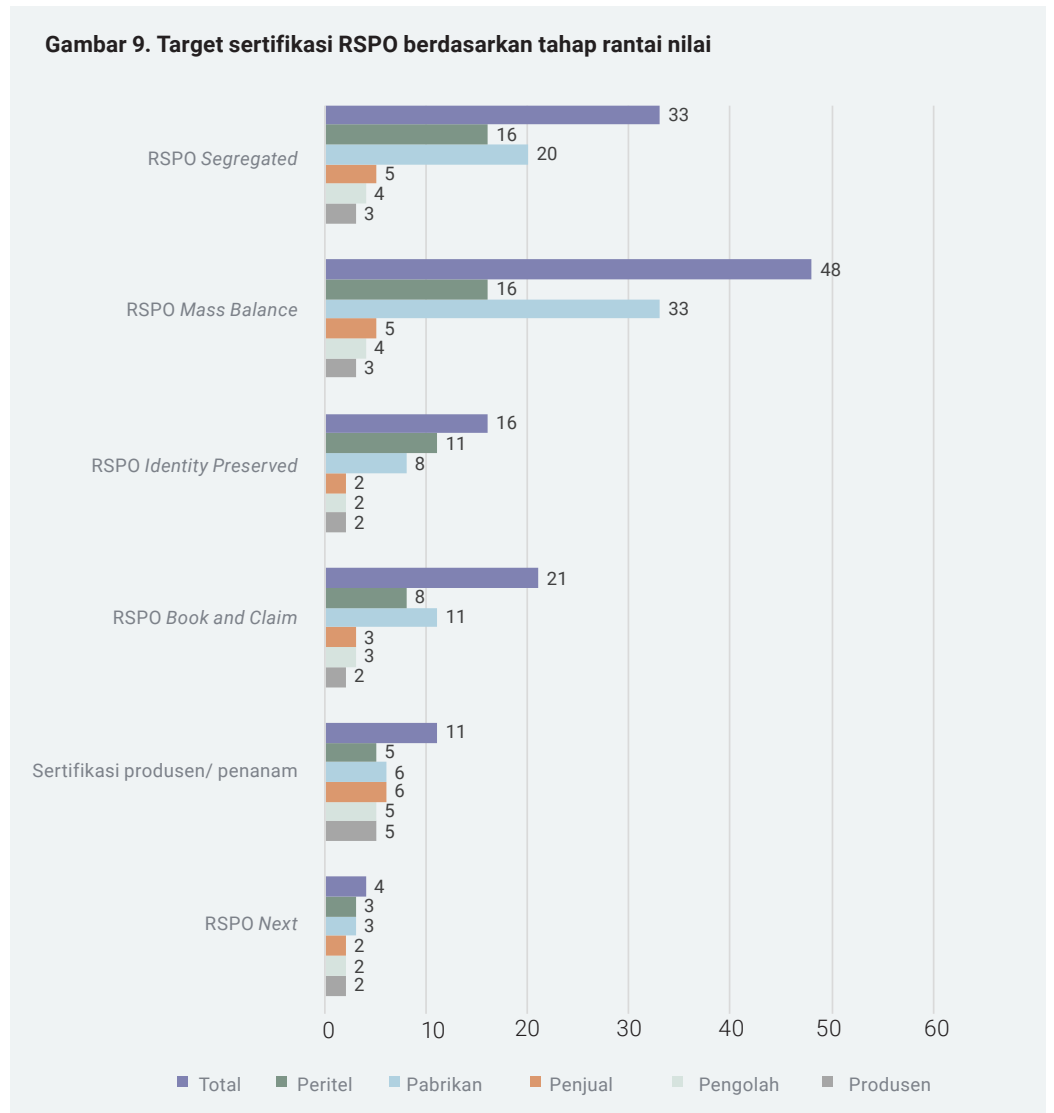


## Studi Kasus: Mars

Pada tahun 2018, usaha kami di Eropa masih memperoleh 100% minyak sawit dengan sertifikasi RSPO *Mass-Balance*. Sejak bulan Januari 2019, kami beralih ke minyak sawit RSPO Segregated untuk Eropa, dan sejak pertengahan tahun 2019 di Australia. Kami juga bermaksud untuk melampaui kriteria RSPO dengan hanya memperoleh minyak sawit dari perusahaan yang operasinya memenuhi piagam pengadaan yang tercantum dalam kebijakan minyak sawit kami. Kami telah menelusuri 98% minyak sawit kami kembali menuju pabrik pengolahannya agar kami dapat menilai dengan lebih baik apakah minyak sawit yang benar-benar kami terima memenuhi standar kami.



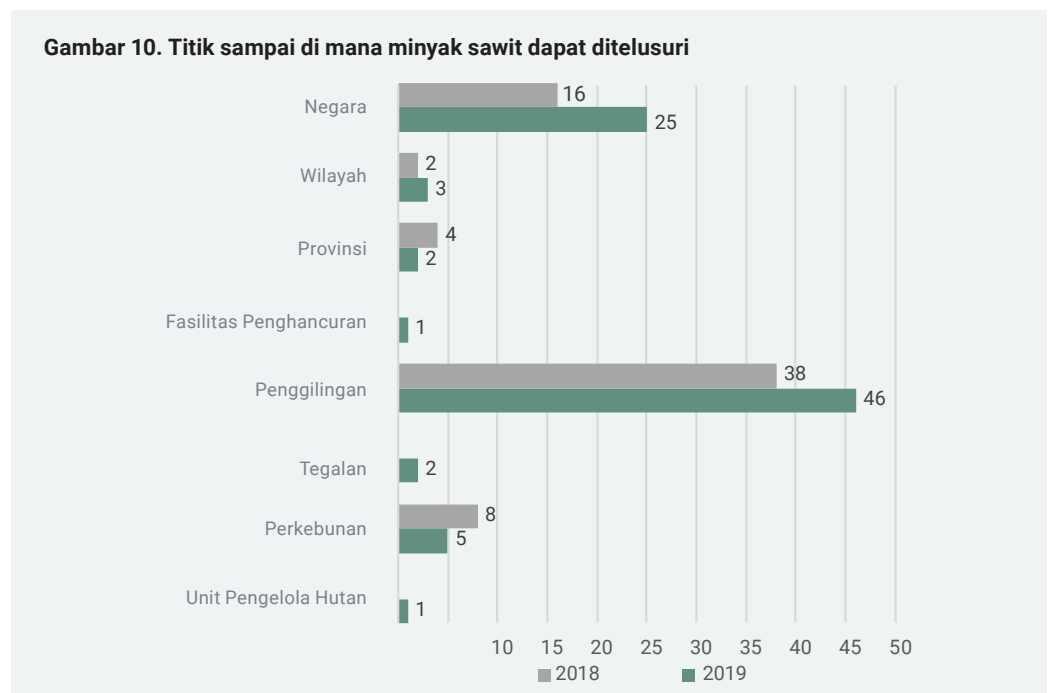
**Gambar 9. Target sertifikasi RSPO berdasarkan tahap rantai nilai**



**Ketertelusuran**

Pada tahun 2019, 86 perusahaan melaporkan memiliki sistem untuk menelusuri asal minyak sawit mereka, meningkat sebesar 19% dibandingkan dengan 72 perusahaan pada tahun 2018. Selain itu, jumlah perusahaan yang mampu menelusuri produk sawit mereka hingga ke tingkat pabrik juga meningkat sebesar 21% dari 38 pada tahun 2018 menjadi 46 perusahaan pada tahun 2019. Akan tetapi, jumlah perusahaan yang melaporkan ketertelusuran hingga ke tingkat kebun menurun dari 8 (10%) perusahaan tahun lalu, menjadi hanya 5 perusahaan (5%) pada tahun 2019.

**Gambar 10. Titik sampai di mana minyak sawit dapat ditelusuri**

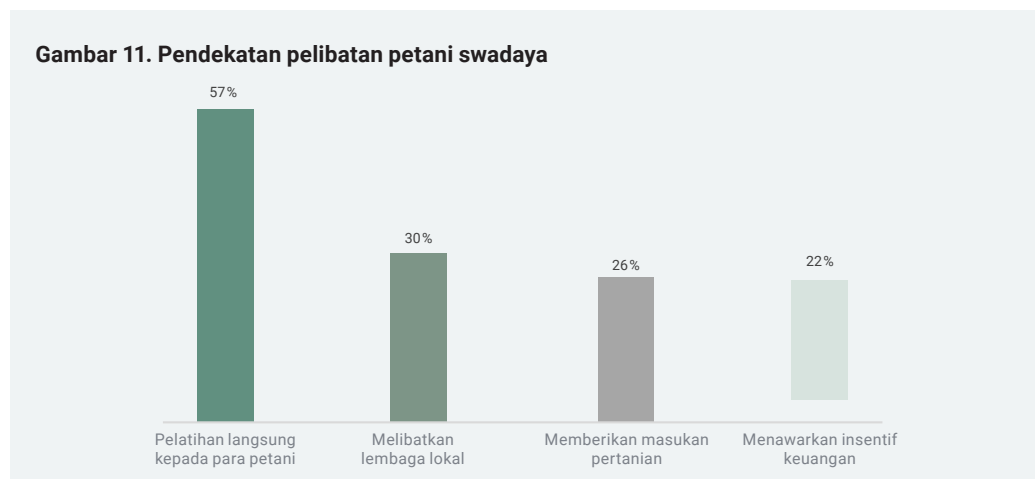


# PELIBATAN RANTAI PASOKAN

Perusahaan telah berulang kali mengidentifikasi rumitnya rantai pasok sebagai salah satu tantangan terbesar dalam memperoleh pasokan kelapa sawit yang berkelanjutan<sup>11</sup>. Para petani swadaya memainkan peran yang sangat penting. Sekitar 40% (4,2 juta hektare) perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki atau dikelola oleh para petani swadaya yang mewakili 35% (12,6 juta ton) produksi minyak sawit mentah<sup>12</sup>. Selain itu, kontribusi petani swadaya terhadap pasokan kelapa sawit diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan pada tahun 2030<sup>13</sup>. Meskipun demikian, data CDP mendapati bahwa 17% dari produsen, pengolah dan penjual melaporkan bahwa mereka masih belum melakukan pelibatan apa pun dengan para pemasok petani swadaya mereka.

Hal yang perlu lebih diperhatikan adalah kesenjangan yang nyata dalam dukungan teknis dan keuangan dari perusahaan hulu yang diberikan kepada para petani swadaya. Analisis mendapati bahwa pelatihan langsung dan lokakarya untuk petani swadaya merupakan pendekatan yang paling sering dilaporkan (57%) oleh perusahaan, akan tetapi, hanya kurang dari seperempat (22%) melaporkan pemberian insentif keuangan kepada para petani swadaya.

Gambar 11. Pendekatan pelibatan petani swadaya



Beberapa perusahaan mengambil langkah yang komprehensif untuk memastikan agar petani swadaya yang menjadi pemasok mampu memberikan pasokan sawit berkelanjutan secara terus-menerus. Salah satu perusahaan tersebut adalah **Golden Agri-Resources** (GAR), yang melibatkan para petani swadaya melalui berbagai kegiatan mulai dari pemberian masukan produksi dan pelatihan untuk mendukung para petani swadaya independen dalam memperoleh akses yang lebih baik untuk membiayai usaha mereka. Pada akhir tahun 2018, sekitar 1.400 petani dilibatkan dalam skema tersebut. Sampai dengan saat ini, GAR telah mencairkan pinjaman bebas bunga sebesar IDR 25 miliar (AS\$1.775.708) untuk mendukung petani swadaya.

Demikian pula, di antara pabrikan dan peritel, jumlah perusahaan yang melibatkan para pemasok langsung telah meningkat dari 76% perusahaan tahun lalu menjadi 83% pada tahun 2019. Sayangnya, jumlah perusahaan yang

memberikan dukungan keuangan atau teknis masih sangat sedikit, masing-masing hanya sebanyak 22% dan 8% perusahaan.

Berbagai langkah telah diimplementasi oleh perusahaan sektor hilir untuk melibatkan para pemasok terkait sawit berkelanjutan. Sebagai contoh, **Mars** membuat *scorecard* pemasok yang mencakup penilaian kebijakan, transparansi, ketertelusuran, program transformasi, proses verifikasi dan mekanisme penyampaian keluhan. Untuk meningkatkan kapasitas pada pemasok mereka, **L'Oreal** menyelenggarakan pertemuan dan webinar serta dialog rutin dengan lebih dari 100 pemasok langsung dan tidak langsung untuk mengumpulkan data tentang arus dan praktik rantai pasokan. Sementara itu, **Danone** melaporkan telah melaksanakan audit pemasok dan mendorong para pemasoknya untuk berupaya memperoleh sertifikasi, khususnya sertifikasi yang lebih ketat seperti RSPO Segregated.

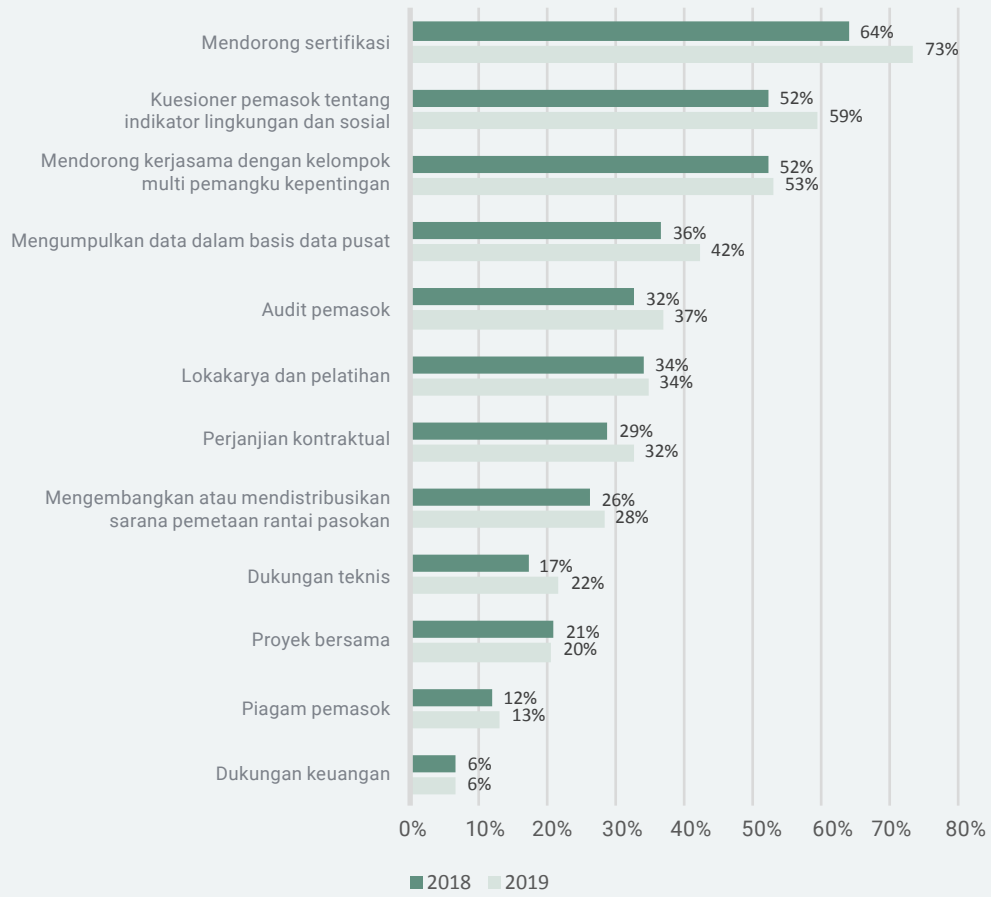
11. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.04.012>

12. The David & Lucile Packard Foundation (2018). Climate and Land Use Revised Palm Oil Strategy 2018 - 2021.

13. <https://www.iopri.org/wp-content/uploads/2017/10/WPLACE-17-1.1.-OIL-PALM-SMALLHOLDER-Bungaran-Saragih.pdf>



**Gambar 12. Pendekatan pelibatan pemasok**





## Studi Kasus: Wilmar International

Mendorong kebijakan NDPE melalui program pelibatan pemasok

Sampai saat ini, **Wilmar** International telah meluncurkan beberapa inisiatif besar untuk secara efektif melibatkan para pemasok pihak ketiga dan petani swadaya. Pada tahun 2013, Wilmar International mengimplementasikan program verifikasi *Supplier Group Compliance* (SGC). Program tersebut memberikan kerangka untuk memantau kepatuhan pemasok terhadap kebijakan NDPE yang saat ini mencakup lebih dari 14,75 juta hektare lahan di Malaysia, Indonesia dan Papua Nugini. Pada tahun 2014, Wilmar International meluncurkan program *Aggregator Refinery Transformation* (ART) yang memberikan platform kerja sama bagi perusahaan pengilangan, pabrik dan perkebunan. Platform ini memungkinkan perusahaan pabrik dan perkebunan untuk melaporkan kemajuan perusahaan dalam lingkup lingkungan hidup, sosial dan kemajuan dalam usaha ketertelusuran. Pada tahun 2017, *Supplier Reporting Tool* (SRT) diluncurkan sebagai alat dalam jaringan bagi para pemasok berisiko rendah untuk melaporkan tentang kepatuhan mereka terhadap kebijakan NDPE.



## Case Study: L'Oréal

Bekerja sama melampaui pemasok langsung untuk memastikan ketahanan rantai pasokan

**L'Oréal** membangun ketahanan rantai pasokan sawit melalui berbagai proyek lapangan dan membuat perjanjian usaha berjangka waktu lebih panjang dengan para pemasok di sektor hulu. Dimulai di tahun 2015, tujuan dari proyek 5 tahun mereka, yang melibatkan para pelaku rantai nilai sawit mulai dari konsumen hingga produsen bahan baku sawit terbarukan, adalah untuk mengintegrasikan para produsen kecil di Malaysia dalam rantai pasokan global untuk mendorong keberlanjutan, ketertelusuran & sertifikasi RSPO.

Penerapan praktik pertanian yang lebih baik, hubungan yang lebih dekat ke pasar global dan komitmen jangka panjang dari para pelaku akan meningkatkan kondisi kehidupan lebih dari 500 petani swadaya. Sejak tahun 2015, L'Oréal telah membeli produk sawit/produk inti kelapa sawit dalam jumlah yang setara dengan 21.357 metrik ton yang diperoleh dari area proyek. Pada tahun 2018, L'Oréal mengimplementasi sebuah proyek baru yang berfokus pada perluasan dukungan bagi 12.500 petani swadaya independen dan ketersediaan sawit berkelanjutan yang disertifikasi di wilayah pengadaan prioritas di Indonesia.



# JALAN MENUJU TRANSFORMASI

Banyak perusahaan yang telah menetapkan ambisi untuk menghilangkan deforestasi dari kegiatan operasi dan rantai pasokan pada tahun 2020. Jelas bahwa komitmen tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya rencana implementasi yang mencakup kebijakan yang jelas untuk menyelaraskan aksi di dalam perusahaan; target berjangka waktu untuk komoditas spesifik sebagai acuan untuk tonggak pencapaian; dan menunjukkan transparansi agar para pemangku kepentingan dapat memantau kemajuan.

Hanya dua bulan sebelum awal tahun 2020, perusahaan yang beroperasi dalam rantai pasokan kelapa sawit Indonesia menunjukkan tanda kemajuan. Perusahaan yang mulai menggunakan kebijakan dan struktur tata kelola yang akan mendukung upaya mereka menuju implementasi, dan transparansi mulai meningkat. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan yang lebar antara ambisi dan eksekusi. Hanya 20% perusahaan yang memiliki target tahun 2020 yang umumnya terfokus pada sertifikasi dan ketertelusuran - yang akan mencapai target tersebut. Target tersebut bahkan tidak dapat memastikan rantai pasokan yang bebas dari deforestasi.

Perusahaan harus beralih dari sekedar mengandalkan sertifikasi menuju pelibatan rantai pasokan yang sesungguhnya yang mencakup bekerja melampaui para pemasok langsung. Dukungan keuangan dan teknis merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan para petani swadaya. Selain itu, komitmen bebas deforestasi yang sudah ada harus ditingkatkan. Inisiatif multi pemangku kepentingan seperti pendekatan yurisdiksi harus mulai dipertimbangkan untuk mendukung implementasi komitmen minyak sawit berkelanjutan.

Akhirnya, transparansi harus diutamakan di seluruh rantai pasokan untuk memberikan kemampuan bagi para investor, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau kemajuan dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil. Akan diperlukan peningkatan ambisi, implementasi yang lebih baik dan kesediaan perusahaan untuk bekerja melampaui batas perusahaan untuk mentransformasikan rantai pasokan sawit - bukan dengan satu demi satu perusahaan, namun dalam sektor tersebut secara keseluruhan.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

**CDP Forests**

Inggris Raya dan Eropa

**Morgan Gillespy**

*Director, Forests*

[morgan.gillespy@cdp.net](mailto:morgan.gillespy@cdp.net)

**Viera Ukropcova**

*Senior projects officer, Forests*

[viera.ukropcova@cdp.net](mailto:viera.ukropcova@cdp.net)

Amerika Utara

**Jillian Gladstone**

*Senior Manager, Forests*

[jillian.gladstone@cdp.net](mailto:jillian.gladstone@cdp.net)

Hong Kong dan Asia Tenggara

**Rini Setiawati**

*Manager, Power of Procurement Project*

[rini.setiawati@cdp.net](mailto:rini.setiawati@cdp.net)

**Wisnu Wibisono**

*Corporate Engagement Officer*

[wisnu.wibisono@cdp.net](mailto:wisnu.wibisono@cdp.net)

**Corporation and Supply Chain**

Hong Kong dan Asia Tenggara

**Candice Low**

*Corporation and Supply Chain Manager*

[candice.low@cdp.net](mailto:candice.low@cdp.net)

**CDP Worldwide**

Level 4

60 Great Tower Street

London EC3R 5AD

Tel: +44 (0) 20 3818 3900

[www.cdp.net](http://www.cdp.net)

Laporan ini didukung oleh: